

## **BAB II**

### **INDONESIA SEBAGAI NEGARA TUJUAN PARA IMIGRAN GELAP DAN DAMPAK GLOBALISASI**

Pada bab kedua ini akan diuraikan tentang Indonesia sebagai negara tujuan para imigran dan bagaimana sikap Pemerintah Indonesia terhadap permasalahan masuknya imigran gelap ke wilayah Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada bab ini, penulis menguraikan data-data jumlah imigran gelap yang masuk ke wilayah Indonesia selama beberapa periode, faktor yang mendorong terjadinya peningkatan kasus imigran gelap di Indonesia dan sikap Pemerintah Indonesia terhadap permasalahan imigran gelap yang sudah menjelma menjadi salah satu permasalahan internasional yang kompleks dan berskala global.

#### **A. Indonesia Sebagai Negara Tujuan Para Imigran Gelap**

##### **1. Banyaknya Para Imigran Gelap yang Masuk Ke Indonesia**

Indonesia merupakan negara yang paling mudah dimasuki oleh imigran gelap karena mempunyai lautan yang sangat luas dan beberapa negara bisa didatangi melalui jalur laut dari Indonesia. Pengamanan laut Indonesia sangat lemah, sehingga mudah dilalui oleh imigran gelap. Umumnya mereka melalui perairan Nusa Tenggara Timur (NTT) karena berdekatan dengan Australia. Umumnya para imigran gelap memasuki wilayah Indonesia melalui perbatasan antara wilayah Indonesia dengan negara tetangga. Perbatasan yang sering dijadikan tempat masuk para

imigran gelap adalah Atambua, Batam, Singkawang dan Tanjung Balai Asahan.

Kehadiran imigran gelap atau yang masuk tanpa izin ke Indonesia ini terus bertambah dari tahun ke tahun. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat jumlah kasus imigran ilegal di Indonesia pada tahun 2010 mengalami peningkatan hampir 100 persen dibanding sebelumnya. Saat ini jumlah imigran ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang signifikan. Data Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebutkan, jumlah kasus imigran gelap yang masuk wilayah Indonesia periode Januari hingga Mei 2010 mencapai 61 kasus. Sedangkan pada periode yang sama tahun 2009 sebanyak 31 kasus. Sementara jumlah orang mencapai 1.245 imigran pada periode 2010 atau naik 67 orang dari tahun 2009 sekitar 1.178 imigran. Para imigran gelap ini masuk ke Indonesia melalui Malaysia. Daerah yang rentan bagi imigran gelap masuk ke Indonesia, antara lain Pantai Barat Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, serta wilayah yang berbatasan dan berdekatan dengan negara tetangga. Mereka datang dari berbagai negara seperti Myanmar, Afganistan, Irak, Sri Lanka, dan Pakistan. Tercatat imigran gelap yang paling banyak berasal dari Afganistan untuk transit di Indonesia menuju Australia.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> <http://www.antaranews.com/berita/1280840290/kasus-imigran-ilegal-meningkat-100>, diakses 29 Juni 2011.

Para imigran gelap tersebut hingga saat ini masih berada di Mataram sebanyak 233 orang, Kupang sebanyak 138 orang, Ujung Pandang sebanyak 135 orang, Merauke sebanyak 163 orang, Cilacap sebanyak 138 orang, Tanjung Balai Asahan sebanyak 107 orang dan Medan sebanyak 92 orang. Selain itu para pengungsi masih berada di Sibolga sebanyak 53 orang, Singkawang sebanyak 17 orang, Tanjung Pinang sebanyak 75 orang, Batam sebanyak 30 orang, Bogor sebanyak 66 orang, Tanjung Perak sebanyak 75 orang, Pasuruan sebanyak 107 orang, Malang sebanyak 66 orang, Denpasar sebanyak 16 orang, Ngurah Rai sebanyak 9 orang, dan Tembaga Pura sebanyak 2 orang. Bila membandingkan dengan data Komisi Tinggi Untuk Pengungsi PBB (UNHCR), sebanyak 478 jiwa di antara mereka berstatus pengungsi, 898 orang merupakan pencari suaka politik dan diterima oleh negara ketiga sebanyak 23 orang. Untuk penanganan imigran gelap ini, pihak Imigrasi telah bekerja sama dengan pihak UNHCR.<sup>32</sup>

Propinsi NTT merupakan salah satu daerah yang banyak dimasuki para imigran gelap dari berbagai negara itu akhir-akhir ini. Pihak Polda NTT mencatat sekitar 500 orang imigran asal Timur Tengah yang ditangkap pihak kepolisian di NTT dalam delapan bulan terakhir ini. Para imigran gelap ini ada yang ditangkap saat hendak masuk maupun keluar dari bandara dan pelabuhan laut resmi di NTT. Tetapi ada juga yang ditangkap karena kapal yang ditumpangi para imigran itu terdampar akibat

---

<sup>32</sup><http://majalahforum.com/fokus.php?tid=51>, diakses 29 Juni 2011.

terombang-ambing dibawa arus. Dari berbagai pemberitaan yang dilansir berbagai media cetak diketahui bahwa daerah atau tempat tujuan mereka sebenarnya bukan Indonesia, tapi Australia. Indonesia dan NTT hanya merupakan daerah transit sebelum menuju ke Australia. Para imigran gelap ini masuk melalui Propinsi NTT, karena propinsi yang terdiri dari pulau-pulau ini sangat mudah bagi para imigran gelap untuk masuk secara ilegal ke Australia. Kondisi NTT yang terdiri dari ratusan pulau itu sangat memungkinkan para imigran untuk menyeberang secara ilegal ke Australia. Apalagi letak Propinsi NTT sangat dekat dengan Australia.

Sebenarnya ada beberapa faktor yang dikhawatirkan pemerintah dan aparat di negeri ini terhadap kehadiran para imigran gelap ini daripada hanya sebagai transit. Pertama, masuknya para imigran gelap ke Indonesia, apalagi dengan jumlah yang terus meningkat, dikhawatirkan dapat menimbulkan gangguan kehidupan sosial, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat. Apalagi kalau kedatangan mereka disusupi oleh kegiatan kriminal, seperti terorisme, *trafficking in person* (perdagangan orang), *transnational crime* (kejahatan transnasional) dan narkoba.<sup>33</sup>

Kedua, Indonesia adalah negara berdaulat. Sebagai negara berdaulat, setiap orang yang masuk ke negara ini, baik sebagai negara tujuan maupun hanya sebagai transit harus dilengkapi dengan izin dan dokumen-dokumen resmi sesuai peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Mereka yang datang ke negara ini tanpa dilengkapi dokumen-

---

<sup>33</sup> <http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/52205/kupangcrime/maraknya-imigran-gelap-1>, diakses 21 Juni 2011.

dokumen resmi atau ilegal harus diberi sanksi tegas atau hukuman sesuai peraturan keimigrasian. Itu sebabnya aparat keamanan di negeri ini berkerja ekstra keras melakukan pengamanan di berbagai pintu masuk dan keluar yang memungkinkan para imigran gelap ini masuk dan keluar dari daerah ini menuju negara tujuan Australia.

Peningkatan jumlah kasus orang asing masuk tanpa izin ke Indonesia itu, merupakan masalah yang penting sehingga harus segera diselesaikan dengan mencari solusinya. Salah satu solusinya, yakni bekerja sama dengan instansi terkait secara berkesinambungan untuk menangani imigran gelap. Selain itu, mengefektifkan pengawasan di daerah pintu lintas batas tradisional dan tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Imigrasi Indonesia memiliki 79 pintu lintas batas tradisional dan 130 TPI dengan jumlah kantor imigrasi sebanyak 108 kantor. Jumlah rumah penampungan imigran gelap (*detensi*) di Indonesia sebanyak 13 lokasi, yakni Tanjung Pinang (pusat), Medan, Pekanbaru, Pontianak, Balikpapan, Makassar, Manado, Jayapura, Kupang, Bali, Jakarta, Semarang dan Surabaya. Direktorat Jenderal Imigrasi juga mencatat pemerintah Indonesia mendeportasi sedikitnya 1.290 orang imigran gelap setiap tahunnya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> <http://www.tribunnews.com/2011/02/26/inilah-jalur-imigran-gelap-di-indonesia>, diakses 29 Jun I 2011

## **2. Kebijakan Indonesia Tentang Imigran Gelap**

Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia sangat rawan terhadap berbagai bentuk tindak kejahatan imigran gelap. Posisi Indonesia dengan daratan yang luas dan garis pantai yang panjang menyebabkan wilayahnya sulit diawasi dari masuknya imigran gelap asal berbagai Negara, terutama dari laut. Para imigran gelap ini bisa masuk melalui wilayah perbatasan, baik pintu imigrasi atau akses resmi dan apa yang disebut sebagai “jalan-jalan tikus” yang tidak terkontrol, yang begitu banyak terdapat di sepanjang garis perbatasan Indonesia dengan Negara-negara tetangga.

Krisis ekonomi, merosotnya tingkat kesejahteraan dan keamanan di banyak Negara, dan bertambahnya angka kemiskinan serta globalisasi dan akses informasi memudahkan berlangsungnya kasus-kasus imigran gelap. Terbatasnya pengamanan wilayah laut Indonesia merawankan masuknya imigran gelap ke wilayah Indonesia. Sebagai Negara kepulauan yang letaknya strategis, dengan batas geografis dan garis panjang yang panjang dan sulit dikontrol oleh aparat keamanan dengan keterbatasan peralatan, menjadi jalur transit para imigran gelap untuk masuk ke Australia, yang mapan dan maju sistem ekonomi dan politiknya. Tidak tegasnya penegakan hukum, atau mudah diajak kerjasama aparat keamanannya, termasuk di tingkat yang rendah seperti RT, menyebabkan mereka mudah memperoleh akses untuk masuk dan menetap sementara. Yang lebih buruk lagi, perilaku aparat keamanan yang bekerja di garis depan terkait dengan

pencegahan dan penanganan imigran gelap ini, mudah disuap dan mau begitu saja mereka untuk keluar masuk melanjutkan perjalanan. Tersedianya banyak calo dan perantara yang bersedia mencari pengirim dan bersedia menjadi pengangkut dengan kapal, telah mendorong peningkatan secara signifikan jumlah imigran gelap yang masuk ke wilayah Indonesia.<sup>35</sup>

Kebijakan penanganan terhadap para imigran gelap ini, selama ini terdapat respons, kebijakan, dan perlakuan yang berbeda-beda. Tergantung pada temuan atas motivasi, yang sebenarnya mengapa mereka melakukan itu. Semua respons pemerintah Indonesia dilakukan secara bertahap, namun dapat dikatakan tidak ada yang sifatnya tegas dan berupa sanksi atau hukuman yang keras. Pada tahap pertama, imigran gelap ditangkap, lalu ditahan. Kalau tuduhannya pidana bisa disidangkan dan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Indonesia. Jika tidak ada tuduhan pidana, para imigran gelap langsung dipulangkan atau dideportasi ke Negara asalnya. Dalam menunggu proses, mereka ditahan sementara, namun bisa juga lama, jika tidak baik komunikasi dengan Negara asal dan jelas penyelesaiannya. Jika jelas dan benar status mereka sebagai pengungsi, dan Negara ketiga mau menerima, mereka bisa segera dikirim ke Negara ketiga. Diluar itu, mulai dilakukan kerjasama bilateral

---

<sup>35</sup> Penjelasan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Abubakar Natapawira, di Jakarta, dalam "Tergilir 90-jutaan Kapal Kecil Nekat ke Australia", Kompas On-line, 3 Nopember 2008.

dan multilateral untuk mengatasi mengalirnya para imigran gelap yang masuk ke wilayah Indonesia.<sup>36</sup>

Kebijakan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi mengalirnya para imigran gelap yang masuk ke wilayah Indonesia yaitu :

1. Penangkapan dan Penahanan Sementara

Langkah penangkapan adalah upaya pertama yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia terhadap para imigran gelap yang tertangkap dalam perjalanan transit di darat. Laporan yang diterima atau masuk dari masyarakat sangat memegang peran penting dalam proses penangkapan mereka yang sedang bersembunyi di daerah transit, atau sedang menunggu pengangkutan selanjutnya ke wilayah lain dan negara tujuan.<sup>37</sup>

Para imigran gelap yang tertangkap di perjalanan bisa langsung dikirim ke tahanan imigrasi pusat di Jakarta, yang memang dikhususkan untuk imigrasi bermasalah.<sup>38</sup>

Penahanan bersifat sementara, sambil mereka diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Para imigran gelap itu kemudian diselidiki motifnya, apakah memang sesuai dengan keterangan ketika mereka tertangkap di lapangan oleh aparat kepolisian atau imigrasi, dan sesuai pula dengan asal usul mereka dan situasi yang berkembang di negara asal. Apakah yang berwenang juga

---

<sup>36</sup> Lihat Kasus "18 Imigran Gelap Kabur dari Rutan", Kompas On-line, 14 Mei 2011.

<sup>37</sup> *Log. Cit*, 14 Mei 2011.

<sup>38</sup> Lihat "UNHCR Verifikasi Muslim Rohingnya", Republika On-line, 17 April 2011.



menyelidiki apakah ada pelanggaran pidana bersama-sama dengan kegiatan imigrasi gelap mereka, seperti penyelundupan narkoba, senjata api, pemalsuan paspor dan visa, pembunuhan , terorisme dan lain sebagainya. Jika ditemukan mereka akan diproses di pengadilan dan dijatuhi hukuman, untuk kemudian dikenakan hukuman penjara yang berkekuatan hukum tetap, dan tidak bersifat sementara lagi.

## 2. Pemulangan Paksa (Deportasi)

Dalam hal para imigran gelap berdasarkan penyelidikan aparat yang berwenang tidak ditemukan terlibat atau berbuat pelanggaran pidana di wilayah Indonesia, mereka bisa segera dilepaskan dan dikembalikan segera ke negara asal. Dalam tahapan ini, penyelidikan tentang latar belakang dan situasi di negara asal telah dilakukan dengan cermat, demikian pula untuk negosiasi penyelesaian masalah mereka dengan baik. Seperti halnya proses penahanan sementara, proses pemulangan (deportasi) menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh negara penangkap imigran gelap tersebut dan yang memulangkannya, kecuali ada kesepakatan khusus antara negara asal dan yang akan melakukan deportasi, bisa saja biaya pemulangan dan fasilitasnya ditanggung oleh negara asal, seperti dalam kasus penyelesaian imigran gelap asal Bangladesh.<sup>39</sup>

Semua masalah teknis pemulangan biasanya ditanggung sepenuhnya oleh negara yang memulangkan. Kebijakan ini bisa

---

<sup>39</sup> *Log. Cit.*, 17 April 2011.

dilakukan secara massal, yang dapat dilakukan melalui jalur darat, laut dan udara, sesuai dengan kondisi di lapangan. Diluar itu, deportasi ada yang dilakukan secara sukarela oleh para imigran yang lama dan tidak sabar tidak memperoleh kepastian *resettlement* dari negara ketiga. Dalam kasus ini bisa saja biaya pemulangan ditanggung sendiri oleh imigran tersebut, mengingat mereka memiliki kemampuan finansial pribadi atau dukungan keluarga mereka.<sup>40</sup>

Namun, di Indonesia dengan disiplin aparat yang rendah, dan hukum tidak diimplementasikan dengan tegas, walaupun telah diketahui para imigran gelap itu tidak memenuhi syarat sebagai pengungsi, atau negara ketiga tidak mau menerima mereka sebagai imigran, tindakan tegas tidak segera dilakukan dengan mendeportasi mereka. Sehingga, hal ini menyebabkan proses penampungan menjadi lama, yang mudah terjadi tindak penyelewengan dan berbagai dampak sampingan.<sup>41</sup>

### 3. Penampungan dan Penahanan Lama

Kebijakan penampungan dan penahanan imigran gelap dalam tempo yang lebih panjang dilakukan jika terdapat penyelidikan mendalam atas status latar belakang mereka dan motivasi mereka. Hal ini terutama jika diantara mereka yang ditengarai terlibat dalam jaringan penyelundupan narkoba dan terorisme internasional. Proses penyelidikan yang lambat dan tidak tegas, apakah mereka perlu

---

<sup>40</sup> Lukman, 2009. *Operational Officer di CWS (Church World Services), Implementing Agency of UNHCR*,

<sup>41</sup> *Log cit*, 17 April 2011.

diperiksa lebih lanjut oleh aparat yang berwenang dan diserahkan ke pengadilan, atautkah segera dinyatakan statusnya dengan jelas sebagai imigran gelap, membuat mereka ditampung lama di karantina atau tempat penahanan imigrasi di berbagai wilayah di Indonesia.

Lemahnya disiplin kerja aparat negara yang berwenang dan penegakan hukum, banyak implikasi negative yang bisa terjadi. Para imigran gelap dapat mencoba mempengaruhi aparat dengan memberikan suap, untuk bisa dilepas dan melarikan diri melanjutkan perjalanan selanjutnya ke negara tujuan akhir. Atau memberikan uang secara tidak langsung melalui calo/perantara mereka di luar penjara.

Mereka bisa juga melarikan diri sewaktu-waktu, karena banyak tersedia kesempatan yang terbuka untuk melakukannya, mengingat mereka diperlakukan istimewa seperti tamu resmi, bukan sebagai tahanan kriminal, termasuk dengan memperdaya aparat berwenang yang bertugas dan menggunakan cara kekerasan terhadap mereka. Sebaliknya, aparat yang berdisiplin rendah, akibat lemahnya kontrol dan penegakan hukum secara nasional, bisa berdalih mereka ditipu dan diperdayai untuk menutupi kelemahan mereka. Sikap tanpa keputusan terhadap imigran gelap yang tertangkap dan ada dalam tahanan, selain disebabkan oleh lambannya proses penyelidikan atas status mereka, juga disebabkan oleh lambannya proses pengadilan walaupun mereka ditengarai kuat telah melakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia, mengakibatkan mereka lama ditampung di tempat

penampungan. Selanjutnya, hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, mengharuskan mereka mendekam lebih lama lagi di tahanan bukan bersifat sementara tetapi sebagai tahanan umum yang berkekuatan hukum tetap.

#### 4. Penyaluran ke Negara Ketiga

Alternatif terakhir kebijakan pemerintah Indonesia terhadap para imigran gelap adalah menyalurkan mereka ke negara tujuan akhir. Hal ini baru segera diproses, jika telah ada kesepakatan untuk menerima mereka, tanpa keberatan apapun, setelah melalui proses negosiasi dan penyelidikan yang cermat dan biasanya memakan waktu yang lama.

Selain memberikan perlakuan jauh lebih baik kepada mereka yang berstatus sebagai pengungsi maupun belum berstatus sebagai pengungsi, karena belum terbukti melalui verifikasi, terutama lewat UNHCR, pemerintah Indonesia memperlihatkan empati yang tinggi kepada mereka yang minta dikirim ke negara ketiga dengan status sebagai pengungsi. Proses pengurusan status dan pengiriman mereka membutuhkan waktu dan sekaligus biaya, yang sudah pasti merepotkan negara transit dan negara tujuan akhir mereka. Dalam beberapa kasus, terdapat pengungsi yang sudah melakukan aplikasi sebagai pengungsi dan tinggal selama 3 sampai 6 tahun di Indonesia, masih belum memperoleh negara tempat pemukiman kembali mereka.

Karena itulah, isu imigran gelap di negara transit dan negara tujuan akhir tidak disukai dan menjadi persoalan internasional.<sup>42</sup>

#### 5. Respons Internasional

Pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan bantuan kemanusiaan secara baik dan layak kepada para imigran gelap dan ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Pemerintah Indonesia bersungguh-sungguh memberikan perhatian serius terhadap upaya penanganan imigran gelap. Namun, menurut pihak di negara tujuan dan organisasi internasional, hal itu belum cukup, sebab Pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional mengenai pengungsi tahun 1951, sehingga ia tidak dapat dikenakan sanksi internasional jika tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya. Amandemen UU Imigrasi No. 12/2006 tidak cukup untuk memerangi kasus penyelundupan manusia atau imigran gelap.

Yang keras dalam merespons dan menangani kasus masuknya imigran gelap selama ini adalah Australia. Tidak heran, kapal-kapal motor dan perahu nelayan tradisional yang menyangkut para imigran gelap tersebut kemudian terbakar atau meledak, mengalami penembakan atau insiden lainnya ketika memasuki wilayah perairan Australia. Sementara, ketika berada di lautan lepas yang ganas justru tidak menghadapi berbagai ancaman.

---

<sup>42</sup> Lukman, 2009. *Operational Officer di CWS (Church World Services), Implementing Agency of UNHCR*,

Pemerintah Australia menolak mengatakan bersikap keras, tetapi tegas, dalam merespons masuknya imigran gelap, karena jika ditoleransi akan berdampak pada keamanan nasional. Pemerintah Australia tampaknya menerapkan kebijakan penangkalan (*deterrent*) atau *pre-emptive* untuk mencegah masuknya imigran gelap ke wilayah Australia. Bagi pemerintah Australia, lebih baik repot dalam menangkal setiap upaya imigran gelap masuk ke wilayah negaranya daripada harus repot menghadapi, menyelesaikan dan bahkan menerima mereka di negaranya. Sementara ketika sudah sampai di wilayah kedaulatan Australia, yang ada hanya tindakan keras dan penerapan sanksi hukum bagi imigran gelap.

Dalam rangka kebijakan penangkalan dan *pre-emptive* ini, Pemerintah Australia rela mengeluarkan biaya besar untuk mendidik aparat, seperti kepolisian, angkatan laut, dephan, depekumham, dan imigrasi di Indonesia dalam menangani kasus-kasus imigran gelap dan mengirimkan mereka ke Australia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan singkat. Pendirian pusat pelatihan itu di Indonesia dengan bantuan Pemerintah Australia, termasuk di Akademi Kepolisian di Semarang, terutama dalam pembiayaannya, sejalan dengan kebijakan Pemerintah Australia dalam menangani kasus terorisme internasional, mengingat masuknya imigran gelap mengandung unsur kejahatan transnasional yang terorganisasi. Melalui jalur bilateral dengan

Pemerintah Indonesia, kerjasama semakin kuat dan gencar dilakukan belakangan ini.<sup>43</sup>

Dalam berbagai pertemuan di tingkat menteri dan kepala pemerintahan, secara formal maupun informal, penanganan imigran gelap telah banyak dibicarakan. Presiden Yudhoyono telah menerima telepon dari Perdana Menteri Kevin Rudd perihal peningkatan pendatang ilegal di tahun 2009, untuk kerjasama mencari solusi terbaik. Kerjasama juga dilakukan masing-masing negara dengan badan internasional yang mengurus pengungsi dan imigran, seperti UNHCR dan IOM. Pemerintah Australia telah memberikan dukungan signifikan melalui pembangunan 15 *detention centres* di berbagai daerah di Indonesia. IOM dalam kerjasamanya sejak 2007 telah memberikan pelatihan pada sebanyak 33 aparat negara dari berbagai instansi.

Kerjasama yang lebih maju tampak dalam kesepakatan UNHCR dan Pemerintah Myanmar di Konferensi Bali untuk melakukan pembangunan ekonomi di wilayah Arakan, Myanmar, untuk mencegah imigran gelap. Pemerintah Australia telah menyatakan kesediaannya untuk berkontribusi dalam program tersebut sebesar 3,2 juta dolar Australia, sehingga lebih maju dari sekedar pembangunan *detention* atau membiayai pelatihan penanggulangan

---

<sup>43</sup> Michael Bliss, Minister Counsellor untuk Politik dan Ekonomi, Kedutaan Besar Australia di Indonesia, 26 Agustus 2009 seperti dikutip Kompas.com., 29 Juni 2011.

imigran gelap seperti dalam kerjasamanya dengan Pemerintah Indonesia selama ini.<sup>44</sup>

## **B. Globalisasi Dan Imigran Gelap**

### **1. Pengaruh Globalisasi Terhadap Imigran Gelap**

Era globalisasi yang ada saat ini membuka peluang untuk terbukanya pasar bebas lintas antar negara. Masing-masing negara memiliki peluang besar untuk saling mengisi kebutuhan di dalam negeri, baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur. Globalisasi dibarengi dengan kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi kian meningkat sehingga membuat batas-batas antar negara semakin semu. Jalur lalu lintas pun semakin mudah untuk diakses.

Migrasi bukanlah fenomena yang baru. Selama berabad-abad, manusia telah melakukan perjalanan untuk berpindah mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir ini, proses globalisasi telah meningkatkan faktor yang mendorong para imigran untuk mencari peruntungan di luar negeri. Hal ini kemudian menyebabkan meningkatnya jumlah aktivitas migrasi dari negara-negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur ke Eropa Barat, Australia dan Amerika Utara. Berangkat dari fenomena ini lah kemudian muncul praktek penyimpangan, yaitu melakukan aksi untuk memindahkan manusia ke negara-negara tujuan secara ilegal karena

---

<sup>44</sup> Robert Asse, *Regional Representative UNHCR* di Jakarta seperti dikutip dalam kompas.com, 29 Juni 2011.



batasan dan ketidakmampuan dari para imigran dalam memenuhi syarat sebagai imigran resmi.<sup>45</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktek kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional di negeri ini juga dapat terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang terbilang besar. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber tenaga kerja yang besar dan sebagai target untuk perkembangan pasar internasional. Berbagai kendala dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi persoalan kejahatan transnasional, seperti kurang sumber daya manusia yang kompeten, kendala dalam bidang teknologi, dan lemah secara yuridik dan diplomatik. Besarnya potensi terjadinya kejahatan transnasional di Indonesia ini merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian serius oleh Pemerintah Indonesia mengingat

---

<sup>45</sup> <http://www.interpol.int/>, diakses 29 Juni 2011.

permasalahan imigran gelap mengandung unsur/muatan kejahatan transnasional seperti : penyelundupan narkoba, senjata api, perdagangan manusia dan berbagai bentuk kejahatan transnasional yang terorganisasi.<sup>46</sup>

Globalisasi mengacu kepada semakin terintegrasi dan terciptanya saling keterkaitan antar negara dalam hubungan internasional. Muncul kesadaran bahwa keamanan dan kemakmuran masyarakat di berbagai kawasan di dunia ini saling terkait dan menyatu.

Globalisasi memiliki aspek ancaman keamanan baru dari *Non-Traditional Security* (NTS). Ancaman ini secara kolektif berasal dari aktor non negara seperti organisasi kriminal, yang mempunyai peran besar untuk dapat mengganggu proses globalisasi.<sup>47</sup> Ancaman NTS membahayakan baik stabilitas negara dan keamanan actor-aktor lain dalam hubungan internasional, termasuk individu. Keamanan negara dan individu menjadi sangat tergantung kepada kerjasama internasional. Dalam upaya untuk melindungi negara dan masyarakat menghadapi kejahatan transnasional tersebut.<sup>48</sup>

Secara klasik konsep keamanan berasal dari paradigma realisme dalam hubungan internasional yaitu adanya ancaman terhadap kedaulatan negara. Namun di era globalisasi saat ini tidak berlaku lagi ancaman tunggal tersebut karena masalah keamanan juga terkait dengan

---

<sup>46</sup><http://nationfortressonline.blogspot.com/2009/08/penanganan-imigran-gelap.html>, diakses 29 Juni 2011.

<sup>47</sup> Ulrich Beck, 'The Silence of Words: On Terror and War', *Security Dialogue*, vol. 34, no. 3, September 2003, p. 259.

<sup>48</sup> The term human security was introduced in the international security discipline following a 1994 *Human Development Report* published by the United Nations Development Programme (UNDP).

kepentingan keamanan manusia selaku individu. Perdebatan terhadap dua kepentingan tersebut sangat terasa dalam masalah penyelundupan manusia, yang sering dipandang sebagai ancaman keamanan non tradisional terhadap negara sekaligus ancaman bahaya bagi keamanan manusia yang sedang membutuhkan bantuan.

Ancaman keamanan non tradisional membutuhkan kerjasama internasional yang melibatkan banyak negara karena berdampak luas. Setiap negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut harus menerima dibatasinya kedaulatan mereka dalam jangka waktu lama karena masalah ini sulit diprediksikan kapan akan berakhir. Kerjasama internasional ini berfungsi seperti “global governance”, dimana norma dan peraturan yang berlaku dibuat untuk kepentingan bersama masyarakat internasional dibawah kepemimpinan PBB. Kerjasama internasional ini juga baru akan berhasil bila mendapat dukungan LSM dan sektor swasta. Dalam masalah penyelundupan manusia keterlibatan mereka dibutuhkan untuk menghentikan arus pendanaan sindikat penyelundup, maupun pengawasan penanganan HAM bagi migran ilegal yang tertangkap.<sup>49</sup>

Dampak buruk globalisasi adalah makin luasnya jaringan kerja sindikat kriminal internasional. Bila semula hanya berbasis tradisional di satu negara atau daerah menjadi berskala global seperti bisnis internasional. Globalisasi tidak menciptakan ancaman keamanan tetapi

---

<sup>49</sup>Paul Stares, ‘New’ and ‘Non-Traditional’ Challenges, <http://www.unu.edu/millennium/stares.pdf>.. diakses 29 Juni 2011.

secara tidak sengaja mempercepat dan memperluas jangkauan dampak kejahatan yang mereka lakukan.

Makin canggihnya proses telekomunikasi dan teknologi informasi membantu organisasi kriminal memperluas wilayah operasional mereka hingga skala internasional. Globalisasi melahirkan efek ketidaksetaraan, menciptakan pihak yang menang dan yang kalah dan kesenjangan yang dalam. Kesenjangan kesejahteraan ini dimanfaatkan oleh organisasi kejahatan internasional untuk memperluas aktifitas kriminal mereka. Sindikat transnasional menisbikan perbatasan antar negara dan yurisdiksi hukum. Upaya untuk menumpas organisasi ini seringkali terhambat oleh tindak korupsi aparat negara dan kurangnya dana operasional untuk memberantas mereka. Kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh organisasi ini untuk memperkuat dan memperluas operasional mereka.

Imigran gelap telah menjadi fenomena global yang menjadi masalah di banyak negara, termasuk Indonesia. Sejak tahun 1994, *The United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* telah mengidentifikasi imigran gelap sebagai masalah banyak negara, khususnya bagi negara sumber, negara transit dan negara tujuan. Kegagalan mengatur arus imigrasi ini dapat membawa kerugian bagi semua pihak. Negara asal (*sources country*) kehilangan tenaga produktif yang potensial untuk pembangunan negaranya, sedangkan negara tujuan (*destination country*) mendapat beban berbagai masalah sosial seperti persaingan kerja dengan penduduk lokal yang tidak *fair*, meningkatnya

pengeluaran dana sosial dan kriminalitas. Sepanjang tahun 1990an, penyelundupan manusia telah menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi organisasi kejahatan transnasional di tingkat lokal maupun internasional. Meningkatnya kejahatan transnasional penyelundupan manusia yang dilakukan oleh sindikat internasional dan tak terkontrolnya migrasi penduduk secara illegal di perbatasan antar negara telah menjadi masalah baru bagi banyak negara. Sering kali penyelundupan manusia tersebut dilakukan dalam kondisi yang tidak manusiawi. Mereka diberangkatkan dan disembunyikan dalam kendaraan yang tidak layak untuk manusia. Status mereka yang illegal membuat mereka tidak dapat berbuat banyak di negara tujuan, selain mendapatkan pekerjaan kasar berupah rendah.<sup>50</sup>

Di era globalisasi, problem kejahatan transnasional ini hanya akan efektif dilawan oleh kerjasama internasional. Untuk mengatasi organisasi kriminal ini, PBB telah mendirikan banyak badan, termasuk *UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* dan *the Commission on Narcotic Drugs* dan ditahun 2000 mengeluarkan *UN Convention Against Transnational Crime*, termasuk Protokol mengenai *Human Smuggling, Sex Trafficking, Illicit Trafficking in Arms, Corruption and others*. Dimana setiap negara akan diminta untuk meratifikasinya ke dalam perundang-undangan mereka. Upaya kerjasama secara bilateral antar negara mengenai masalah ini masih sangat terbatas. Namun harus

---

<sup>50</sup> <http://www.interpol.int/public/THB/PeopleSmuggling/Default.asp>. 31 maret 2009, diakses 29 Juni 2011.

diakui kerjasama transnasional mengenai masalah ini tidak mudah dilaksanakan karena menyangkut masalah kedaulatan negara, yurisdiksi, pertukaran informasi, hukum ekstradisi dan masalah korupsi yang cukup sensitif. Masalah kejahatan transnasional sangat terkait dengan masalah kedaulatan nasional satu negara.

Di satu pihak aktifitas kriminal transnasional merupakan ancaman bagi kedaulatan negara dan integritas kemandirian satu negara dan membahayakan kelangsungan pemerintahan. Tetapi dilain pihak, efektifitas kerjasama dalam menanggulangi masalah ini membutuhkan berkurangnya kedaulatan negara, karena mereka harus menyerahkan sedikit otonomi daerah untuk diatur secara nasional demi mengatasi masalah globalisasi. Selama negara-negara di kawasan tersebut tidak peduli terhadap masalah ini, penyelundupan manusia akan terus berlanjut bahkan semakin meningkat.<sup>51</sup>

Makin banyak organisasi kriminal yang beralih usaha, dari penyelundupan narkoba menjadi penyelundupan manusia karena lebih menguntungkan, lebih sedikit resikonya, dan bila tertangkap hukuman yang diterima lebih ringan dibandingkan dengan penyelundup narkoba. Penanganan isu penyelundupan manusia tidak mudah untuk ditangani karena masalah ini juga terkait dengan masalah keamanan manusia. Penyelundupan dan perdagangan manusia merupakan praktek pelanggaran HAM karena beresiko pada keselamatan manusia yang diselundupkan

---

<sup>51</sup>*Log. Cit*, diakses 29 Juni 2011.

maupun yang diperdagangkan tersebut. Sehingga isu ini tidak hanya dikategorikan dalam isu sekuritisasi melainkan juga isu HAM.

Dengan melihat dari kacamata HAM, migran ilegal berubah status bukan lagi sebagai musuh atau ancaman tetapi sebagai 'korban'. Karena mereka adalah korban dari kegagalan pemerintahan di negara asalnya, yang terusir dari negaranya karena keselamatan mereka terancam. Korban penyelundupan acapkali dideportasi tanpa melalui masa pemulihan yang memadai, meski mereka telah mengalami trauma fisik, kekerasan seksual dan psikologi yang membutuhkan lingkungan yang baik, pendampingan dari orang-orang terlatih untuk membuat mereka merasa aman dan mendapat bantuan hukum.

Berdasarkan pengamatan di dua *education center* milik UNHCR yakni di Jawa Barat maupun di Jakarta, apapun alasan yang melatarbelakanginya, migrasi selalu membawa tekanan kejiwaan pada setiap pelakunya. Migrasi berarti berpisah dengan keluarga, teman-teman, jaringan sosial yang sudah terbangun selama ini, meninggalkan rutinitas tradisional, sistem nilai dan pola-pola perilaku yang sudah diterima dan dilakukan dan harus beradaptasi dengan lingkungan sosial dan psikososial yang baru. Hal ini dapat membawa resiko kesehatan jiwa pada mereka. Oleh sebab itu, memusatkan perhatian kepada aspek psikososial dan

kesejahteraan mental kaum migran adalah hal yang sangat penting dan komponen dasar untuk keberhasilan migrasi itu sendiri.<sup>52</sup>

Para pencari suaka dan pengungsi mempunyai pengalaman traumatik yang lebih besar dibandingkan migran ekonomi. Mereka adalah manusia yang terpaksa pergi dari negaranya sebagai dampak dari konflik modern yang disebabkan pemerintahan yang gagal. Pencari suaka dan pengungsi merupakan “migrasi karena paksaan”, kondisi tersebut mempunyai efek yang lebih menyakitkan bagi si pelaku dibanding migrasi karena keinginan untuk meningkatkan status finansial.<sup>53</sup>

Globalisasi sindikat imigran gelap tampaknya berjalan seiring dengan globalisasi ekonomi dunia. Para penyelundup juga tidak membedakan antara pengungsi dan migran ekonomi, mereka sekedar menyelundupkan siapapun yang mampu membayar. Para penyelundup memanfaatkan peraturan yang ketat di perbatasan setiap negara, semakin ketat peraturan di wilayah perbatasan dan diperketatnya pemberian visa justru mendorong lebih banyak orang, baik pengungsi maupun migran ekonomi, kedalam penggunaan jasa penyelundupan. Pada umumnya penyelundupan manusia dilakukan oleh organisasi kriminal yang biasa melakukan penyelundupan barang. Usaha ini seringkali dilakukan sebagai

---

<sup>52</sup> Anna Kicing, “Non-Traditional Security Threat and The EU Responses to This Phenomenon,” [http://www.cefmr.pan.pl/docs/cefmr\\_wp\\_2004-02.pdf](http://www.cefmr.pan.pl/docs/cefmr_wp_2004-02.pdf), diakses 1 September 2009 Kaum Migran dan Populasi Terusir/Terlantar Lainnya; Aspek-aspek Spesial [http://rsjlawang.com/artikel\\_080519a.html](http://rsjlawang.com/artikel_080519a.html)14/7/2009, diakses 11 Agustus 2009

<sup>53</sup> Isagani Serrano, “Community development and globalization”, dalam *Civil Society, Religion and Global Governance – Paradigmas of power and persuasion*, Helen James (ed.), London, Routledge; 2007, 189-190.



kegiatan sampingan dari bisnis utama mereka. Namun bisnis ini berangsur-angsur menjadi bisnis utama karena keuntungan yang diraih besar sementara resiko yang dihadapi lebih kecil dibandingkan jenis bisnis penyelundupan lainnya.

Dalam melaksanakan penyelundupan manusia melalui negara transit, mereka bekerja sama dengan kelompok kriminal lokal untuk menyediakan berbagai keperluan dokumen, akomodasi dan kontak-kontak untuk perjalanan selanjutnya. Migran illegal tersebut kemudian dibantu mencari pekerjaan di negara tujuan, umumnya dipekerjakan sebagai tenaga murah untuk berbagai pekerjaan kasar. Sedemikian besar ongkos perjalanan tersebut sehingga mereka kadangkala berhutang kepada sindikat penyelundup tersebut bila telah bekerja di negara tujuan. Pada akhirnya hutang tersebut tidak pernah lunas, dan mereka akhirnya juga terjerumus untuk melakukan pekerjaan illegal atau menjadi bagian dari organisasi penyelundupan manusia itu sendiri.

Pengawasan pemerintah terhadap sindikat imigran gelap terutama di negara maju, semakin ketat. Tetapi sindikat ini tetap dapat bertahan dan terus bertambah jumlahnya, sebab selalu ada orang yang membutuhkan keahlian dan bersedia membayar mahal kepada mereka. Meskipun penghasilan yang didapat jauh lebih besar, resiko hukuman yang didapat bila tertangkap dalam bisnis inipun tidak sebesar yang dihadapi bila mereka melakukan penyelundupan senjata, narkoba, atau usaha illegal lainnya. Sindikat penyelundup bekerja berantai dari negara asal menuju

negara transit hingga ke negara tujuan. Dalam menjalankan kegiatannya, mereka merekrut dan bekerja sama kelompok lokal tambahan di negara transit untuk membantu kegiatan mereka, seperti menyiapkan dokumen perjalanan, akomodasi dan jaringan kerja untuk menjalankan operasional penyelundupan mereka. Migran ilegal merupakan sumber tenaga kerja murah di negara maju, dan biasanya dipekerjakan sebagai tenaga murah di restaurant, buruh pabrik hingga menjadi kaki tangan organisasi kriminal.<sup>54</sup>

Sementara di tahun 2002, diperkirakan pendapatan yang diperoleh sindikat penyelundup dari usahanya berkisar \$7 juta dolar pertahun. Sebagai contoh migran ilegal dari provinsi Fujian di China yang ingin pergi ke New York Amerika Serikat setidaknya harus membayar \$35.000, sedangkan biaya untuk tujuan Eropa yakni sekitar \$10,000-\$15,000. Seorang migrant ilegal dari India atau Pakistan harus membayar \$ 25.000 untuk tujuan Amerika Serikat. Migran ilegal dari Irak membayar sedikitnya \$5000 untuk tujuan Eropa. Perjalanan ilegal termurah adalah dari Meksiko ke Los Angeles Amerika Serikat yakni sekitar \$200-\$400, tetapi dilakukan dengan jumlah banyak sehingga tetap menghasilkan keuntungan yang besar.<sup>55</sup>

Secara tradisional terjadi spesialisasi dalam penyelundupan manusia, misalnya dengan memfokuskan penyelundupan manusia pada kelompok etnis atau bangsa mereka sendiri. Penyelundup dari Timur Tengah akan bekerja dengan pihak-pihak yang masih keturunan Arab di

---

<sup>54</sup> *Log. Cit.* 2007, 189-190.

<sup>55</sup> Bertil Lintner, "Illegal Migration in the 21st Century," *YaleGlobal*, 10 January 2003; Illegal Migration in the 21st Century, <http://yaleglobal.yale.edu/display.article?id=704&page=2>.

setiap negara transit. Akhir dari perjalanan penyelundupan manusia melalui Asia ke Australia adalah di Indonesia, sehingga penyelundup di Indonesia mempunyai spesialisasi atau berperan sebagai 'tukang perahu' menuju Australia. Sebagai contoh perjalanan migran ilegal dari Afghanistan menuju Australia. Afghanistan merupakan negara asal pengungsi nomor satu di dunia saat ini dan memiliki rekor tersendiri dalam masalah penyelundupan manusia. Sejak AS menyerbu Afghanistan untuk memerangi Al Qaeda di negara tersebut, rakyat Afghanistan, termasuk mereka yang merupakan anggota maupun simpatisan Al-Qaeda, berusaha pergi meninggalkan negaranya sebagai migran ilegal. Karenanya migran dari negara tersebut kadang mendapat tuduhan sebagai bagian dari jaringan terorisme Al Qaeda. Di Afghanistan sindikat penyelundupan manusia biasa disebut "*Underworld travel agents*," Langkah migran ilegal Afghanistan dimulai dengan mengungsi ke "*Controlled Procedures*" di Pakistan, khususnya wilayah Peshawar, dimana terdapat penghubung yang dapat mencarikan visa palsu, kemudian dibuatkan identitas palsu. Untuk semakin meyakinkan status sebagai pencari suaka politik, obyek dapat dibuatkan kartu keanggotaan partai komunis dan surat interogasi tahanan dari Pemerintahān Talibān.<sup>56</sup>

Bila perlu dapat juga dilakukan pendampingan hingga ke negara tujuan. Mendekati tempat tujuan semua dokumen perjalanan dan tiket biasanya dimusnahkan untuk menyulitkan pihak berwajib melacak jejak

---

<sup>56</sup>Melinda Liu, "Inside 'People Smuggling'", *NEWSWEEK*, Nov 5, 2001 <http://www.newsweek.com/id/76306/page/2>, diakses 29 Juni 2011.

perjalanan mereka agar tidak direpatriasi. Migran ilegal tersebut juga diajari cara menjawab pertanyaan saat mengajukan permintaan suaka ke negara tujuan, sehingga tidak mudah untuk mengetahui apakah mereka pengungsi yang sebenarnya. Jaringan penyelundup bahkan ada yang memberi jaminan uang kembali bila mereka tidak berhasil sampai ke negara tujuan, atau boleh mencicil dan melunasinya jika telah sampai di negara tujuan.

Perjalanan dimulai dari perbatasan Afghanistan ke Pakistan ditempuh dengan bis, kemudian dilanjutkan dengan pesawat terbang ke Malaysia. Malaysia menjadi tujuan karena pemerintah Malaysia mengizinkan Muslim dari Afghanistan, Pakistan dan Timur Tengah masuk ke wilayahnya tanpa visa dalam kunjungan sosial selama enam bulan. Perjalanan dilanjutkan dengan kapal menuju ke Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan menyebar ke daerah-daerah yang mudah untuk diseberangkan dengan kapal kayu ke Australia. Bila semula wilayah Timur Indonesia, seperti Nusa Tenggara Barat dan Timur, bahkan Papua menjadi dipilih sebagai daerah keberangkatan mereka ke Australia, sekarang telah terjadi lokasi keberangkatan baru. Para migran ilegal gelombang baru tersebut masuk dari Malaysia ke berbagai provinsi di Pulau Sumatra untuk kemudian menuju daerah keberangkatan baru di Provinsi Banten atau Pantura dengan tujuan Pulau Christmast. Kepulauan Aru di Maluku diduga juga telah menjadi jalur baru penyelundupan migran dari Timur Tengah menuju kawasan utara Australia. Sindikat memanfaatkan pulau-pulau kecil

tak berpenghuni di kecamatan Aru selatan yang minim pengawasan. Selama di Indonesia keberadaan mereka diatur oleh sindikat local (WNI). Para migran yang tertangkap umumnya mereka tidak mengaku atau tidak mau menyebutkan siapa agen yang mengatur perjalanan mereka. Adapula yang mengaku ditipu oleh agen yang mengatasnamakan UNHCR. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa globalisasi berdampak pada semakin mudahnya arus migrasi secara illegal yang dikoordinasi oleh jaringan internasional seiring dengan semakin semunya batas teritorial wilayah antar negara sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti saat ini.<sup>57</sup>

## 2. Faktor-faktor yang Mendorong Terjadinya Imigran Gelap

Buruknya kehidupan dan suramnya masa depan di negara asal adalah alasan umum dan pemicu terbesar kasus-kasus mengalirnya imigran gelap ke negara lain. Perubahan nasib dan keadaan, serta kehidupan yang lebih baik di negeri baru, merupakan harapan para imigran gelap untuk lari dari negeri mereka. Dengan keluar dari negara asal mereka, paling tidak mereka memiliki harapan baru, dengan peluang hidup dan masa depan yang berbeda jika telah berada di negara transit, apalagi tujuan. Jika di kalangan imigran gelap yang akan ke Amerika ada yang disebut sebagai *American dream*, maka di kalangan imigran gelap yang menuju ke Australia, terdapat pula impian seperti itu, yang bisa dikatakan sebagai *Australian dream*.

---

<sup>57</sup> "WNI Bantu Perjalanan Migran Gelap", Kompas 27 Juni 2009, h. 24

Dilihat secara detil, motivasi para imigran gelap bisa saja sedikit berbeda. Tetapi, pada umumnya, motivasi yang menyebabkan mereka melakukan imigrasi secara ilegal adalah adanya permasalahan krusial yang mereka hadapi di negara asal masing-masing, yang dapat dilihat dari perspektif politik, keamanan, ekonomi, maupun pandangan individual.<sup>58</sup> Tanpa permasalahan-permasalahan dasar ini, tidak mungkin mereka mau melakukan kegiatan yang sangat berisiko, yang membutuhkan biaya material dan manusiawi yang tinggi, yang pada akhirnya nyawa mereka sendiri menjadi taruhan di perjalanan, terutama di laut lepas, baik akibat tantangan alam, maupun kebijakan keras aparat keamanan di negara transit dan tujuan. Jadi, bagaimanapun, ada penyebab jelas mengalirnya imigran gelap dari suatu negara ke negara lainnya.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya imigran gelap dapat dilihat dari beberapa perspektif yaitu :

### **1. Politik**

Persoalan mendasar dalam negeri yang menyebabkan banyak penduduk Pakistan, Bangladesh, dan Myanmar ingin keluar dari negerinya, melarikan diri ke negeri lain, termasuk dengan cara ilegal menjadi imigran gelap. Sikap pemerintah yang berkuasa yang tidak dapat diterima, yang tidak mempunyai empati, dan konflik politik domestik yang berkepanjangan telah mengakibatkan munculnya ketidakstabilan politik yang akut di ketiga negeri itu.

---

<sup>58</sup> [http: www.vivanews.com](http://www.vivanews.com) diunduh tanggal 15 Juli 2011

Di Pakistan dan Bangladesh, dua negara yang bertetangga, dan juga bersaudara, karena dulunya memang satu negara, pilihan atas demokrasi telah membawa kisruh politik dalam negeri yang tidak kunjung selesai, dan bukan segera menjadi *panacea* untuk memperbaiki kisruh politik sebelumnya akibat penjajahan Barat, konflik agama, dan otoriterisme pemerintahan militer. Sebaliknya, di Myanmar, demokrasi yang menjadi harapan kelompok-kelompok anti-rejim otoriter militer yang telah berkuasa selama beberapa tahun belakangan, tidak kunjung datang, dan telah menyebabkan banyak penduduk yang tertindas, terutama kelompok minoritas, seperti etnis Muslim Rohingya, yang berseberangan dengan kelompok etnis militer yang tengah berkuasa, terpaksa melarikan diri dan masuk secara ilegal ke negeri lain, termasuk ke Thailand, Malaysia, dan Indonesia, untuk bisa diterima tinggal di negeri-negeri baru ini.

Konflik demokrasi secara realistis telah menyebabkan eskalasi kekerasan dalam jangka panjang, terutama setelah terimbas munculnya kelompok-kelompok ekstrim keagamaan. Perkembangan politik yang buruk di Afghanistan setelah jatuhnya rejim konservatif Taliban, dan perang melawan terorisme yang dilancarkan Barat yang belum selesai di sana, berdampak buruk pada kondisi dalam negeri Pakistan pasca-Musharraf.<sup>59</sup> Tidak heran, penduduk kedua negeri Muslim di jazirah Asia Selatan itu mencari negeri-negeri yang lebih moderat dan lebih

---

<sup>59</sup> <http://metrotv.com>, diunduh tanggal 15 Juli 2011

baik kondisinya, yang kehidupan sehari-hari penduduk dan masa depannya tidak terganggu.

Di kawasan Timur-Tengah pun demikian, terjadi pengaliran penduduk keluar baik secara legal maupun ilegal keluar Irak dan Iran. Dari Irak, yang mengalir jauh lebih banyak, karena ia telah menjadi sebuah negara gagal (*failed state*), setelah jatuhnya Saddam Hussein, yang diindikasikan dengan maraknya konflik sektarian antar-pengikut aliran agama, serta juga aksi-aksi terorisme sebagai perlawanan terhadap rejim baru ciptaan-Barat di satu pihak, dan perang melawan terorisme yang terus dilancarkan Barat, di pihak lain, terutama AS. Tidak berhentinya hingga dewasa ini serangan bom bunuh diri yang selalu menyebabkan juga jatuhnya korban sipil membuat Irak sebagai kawasan tidak aman, yang tidak hanya membuat penduduk setenpat ingin keluar dari Irak, melainkan juga militer asing yang ditugaskan di sana.<sup>60</sup>

Eskalasi kekerasan di Irak meningkat pesat setelah jatuhnya pemerintahan konservatif Taliban di Afghanistan akibat invasi militer AS ke Timur-Tengah. Walaupun rejim sipil pengganti yang tidak otoriter telah berhasil dibentuk dengan bantuan Barat, namun tertib sipil dan keamanan domestik tetap belum berhasil diwujudkan. Para actor non-negara di Afghanistan di bawah kendali Taliban yang terpojok meningkatkan perjuangannya melawan ofensi militer Barat

---

<sup>60</sup>Lihat, misalnya, "Polri Tangkap 40 Warga Irak Tanpa Dokumen," *Kompas-Online*, 11 April 2009.



dengan memanfaatkan wilayah-wilayah di Pakistan yang banyak didiami kelompok-kelompok konservatif pro-Taliban. Akibatnya, Pakistan, setelah Afghanistan dan Irak, kini menjadi wilayah paling berbahaya baru di dunia. Tidak mengejutkan, penduduk ketiga negeri itu banyak yang lari menyelamatkan diri ke luar negara mereka dengan berbagai macam cara.

Mereka yang memiliki modal atau uang, jelas mempunyai kesempatan lebih luas untuk menjadi imigran, sekalipun secara ilegal, jika ditentang kepergian mereka dari negeri asal mereka dan kedatangan mereka di negeri baru. Iran, tetangga Irak, kondisi politik dan keamanan domestiknya memang berbeda, karena terkontrol dengan baik oleh pemerintahan Ahmadinejad. Tetapi, tidak semua menyukai rejim konservatif Ahmadinejad yang telah berkuasa selama 2 periode ini.

Sehingga, mereka yang melakukan kegiatan imigrasi secara ilegal menggunakan alasan ini untuk keluar dari Iran dan mencari negeri baru. Mereka yang tertangkap di Indonesia, dan mereka yang akan melanjutkan perjalanan ilegalnya ke Australia, dapat diidentifikasi sebagai mereka yang tidak dapat menerima situasi politik dalam negeri Iran pasca pemerintahan moderat Khatami. Sikap Presiden Ahmadinejad yang keras terus menentang Barat dengan propaganda pengembangan kekuatan nuklirnya, yang berimplikasi luas meningkatkan ketegangan di Iran dan kawasan, menciptakan keadaan

tidak nyaman penduduknya, terutama mereka yang berpikir moderat dan pragmatis, apalagi pro-Barat.<sup>61</sup>

Di negara-negara di atas, konflik politik yang berkepanjangan mengakibatkan penduduk kehilangan harapan akan masa depan, karena tidak saja kondisi kemiskinan semakin menghantam, tetapi juga hidup mereka secara individual atau keluarga semakin terancam, terutama yang dialami kelompok-kelompok minoritas yang berseberangan ideologi dengan pemerintah yang berkuasa. Secara geografis, negara-negara asal imigran gelap ini memang memiliki latar belakang yang sama: terletak di satu kontinen dan kawasan yang sama, yakni Asia Selatan dan Timur Tengah; memiliki sistem politik (demokratis) yang belum *established* atau rapuh, atau, jika tidak, konservatif atau otoriter pemerintah mereka; terbelakang kondisi ekonominya, dan mempunyai kelompok-kelompok mayoritas berkuasa yang sangat tidak toleran terhadap kelompok minoritas.

Sementara, Indonesia, walaupun memiliki karakteristik yang menyerupai, tetapi, secara politik, konflik masih terkontrol, dan kondisi ekonominya masih jauh lebih baik dibandingkan dengan Myanmar, Bangladesh, Srilanka, Afghanistan, Irak, Pakistan, dan Iran. Sehingga, dari perspektif keamanan dan ekonomi pun, Indonesia masih jauh lebih baik untuk ditinggali, karena masih memberikan kenyamanan hidup dan masa depan. Jadi, adalah logis jumlah imigran gelap asal

---

<sup>61</sup> Lihat informasi pembaca dalam "Polri Tangkap 40 Warga Irak Tanpa Dokumen," *Kompas-Online*, 11 April 2011.

Indonesia ke negara maju lebih sedikit. Pelaku asal Indonesia lebih banyak memainkan peran sebagai perantara atau pihak yang mengirimkan dari pada menjadi imigran ilegal itu sendiri. Begitu pula dengan pelaku asal Malaysia, mengingat kondisi ekonomi Malaysia lebih baik dari Indonesia.<sup>62</sup>

## 2. Keamanan

Myanmar, yang belakangan ini merupakan sumber asal pengungsi dalam jumlah besar dan beberapa gelombang kedatangan, sejak lama berada di bawah cengkeraman kekuasaan rejim militer yang otoriter dan represif, khususnya terhadap kelompok prodemokrasi dan minoritas etnik. Demokrasi yang menjadi kunci ke arah kehidupan politik yang demokratis, tanpa diskriminasi, tidak kunjung tiba, melainkan hanya merupakan janji-janji palsu rejim militer. Sejak ditangkapnya tokoh utama gerakan pro-demokrasi, Aung San Syu Kyi, oleh rejim militer yang telah membatalkan kemenangan pemilu kelompok tersebut, perilaku rejim militer semakin otoriter dan represif terhadap penduduknya, tidak terkecuali kelompok etnik minoritas yang memang berbeda latar belakang etnik dengan rejim militer yang berkuasa. Karena tidak tahan bertahun-tahun diperlakukan secara represif oleh pemerintah yang berkuasa, mereka kemudian melarikan diri melalui laut dengan perahu-perahu tradisional mereka keluar

---

<sup>62</sup> Lihat, misalnya, "47 Warga Asing Ditangkap," *Kompas-Online*, 26 April 2011.

negeri itu, dan tiba atau pun terdampar antara lain di Thailand, Malaysia, dan Indonesia.

Begitu pula, di Srilanka, sejak lama konflik berkecamuk antara kelompok etnik Sinhala yang mayoritas dengan kelompok etnis Tamil yang minoritas. Gencatan senjata yang telah berhasil dicapai setelah konflik hebat dan banyak menelan korban jiwa selama bertahun-tahun, dalam kenyataannya, tidak berlangsung lama, karena kemudian perang berkecamuk kembali. Tidak adanya solusi permanen atas masalah yang dihadapi kedua belah pihak, menyebabkan perang dan aksi-aksi kekerasan berlangsung lagi. Kelompok minoritas Tamil pun kembali mengangkat senjata dan memperjuangkan aspirasi separatisme mereka membentuk negara sendiri. Namun, di luar kelompok perjuangan bersenjata *Tamil Elam* (Macam Tamil), penduduk sipil banyak menjadi korban, sehingga untuk menghindari gelombang kekerasan akibat perang fase baru itu, mereka melarikan diri ke negara lain dengan menggunakan perahu-perahu. Jumlah mereka yang keluar dari negerinya dengan perahu-perahu semakin banyak belakangan ini setelah pemerintah Srilanka melakukan ofensif militer besar-besaran ke sarang gerilyawan Macan Tamil.

Keadaan terpaksa menghindari ofensif militer pemerintah Sinhala menyebabkan banyak penduduk Tamil menjadi imigran ilegal karena mereka berusaha masuk ke berbagai negara tanpa dilengkapi dokumen perjalanan yang sah. Kekhawatiran terhadap perang yang

berkecamuk dan tidak berkesudahan juga dihadapi penduduk sipil di Afghanistan dan Irak. Eskalasi konflik yang meningkat dan mengancam nyawa dan kehidupan keluarga, dan kegagalan badan dunia PBB dan dunia internasional untuk mencegahnya dan mengatasinya, menyebabkan banyak penduduk sipil mencari wilayah aman baru di berbagai negara. Rasa aman juga dicari penduduk sipil Iran yang berseberangan secara ideologis dengan pemerintah konservatif yang tengah berkuasa di sana.

Secara realistis, rasa aman juga dicari penduduk sipil Iran yang berseberangan secara ideologis dengan pemerintah konservatif yang tengah berkuasa di sana. Harapan akan kebebasan dari rasa takut dan tertekan karena perbedaan pandangan, dan sirnanya impian akan kehidupan yang aman dan damai di masa depan mendorong mereka harus keluar mencari negeri baru yang menghargai eksistensi pandangan hidup dan peran mereka. Negeri-negeri yang moderat sekaligus maju (modern) menjadi pilihan dan tujuan akhir perjalanan mereka. Mereka yang bermodal dengan mudah dapat melakukan ini, dengan menggunakan berbagai macam cara, walaupun ilegal dan perjalanannya panjang atau berliku-liku, agar dapat keluar dari negerinya yang orthodox itu, dan sampai di negara tujuan baru.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Lihat, "47 Warga Asing Ditangkap," *Kompas-Online*, 26 April 2011.

### 3. Ekonomi

Myanmar, Bangladesh, Srilanka, Afghanistan, Pakistan, dan Irak, negeri-negeri asal imigran gelap tersebut, menghadapi kemiskinan dan keterpurukan ekonomi yang hebat, akibat pemerintahan yang otoriter, sistem politik yang korup ataupun konflik politik dan perang saudara yang berkepanjangan. Ketidakstabilan politik dalam negeri yang lama telah membawa dampak sangat buruk pada perekonomian masing-masing negara. Stagnasi ekonomi, tidak adanya peluang usaha, tidak tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pengangguran, serta merosot dan buruknya kesejahteraan dan kualitas kehidupan penduduk mendorong mereka mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain.

Ketidakmampuan mereka membiayai perjalanan dan persyaratan yang tidak terpenuhi untuk dapat memasuki negara lain secara sah membuat mereka terdampar sebagai imigran ilegal. Mereka yang memiliki kemampuan ekonomi semakin besar dimotivasi oleh kepentingan pragmatis mencari peluang ekonomi yang menyediakan berbagai masa depan yang lebih baik di negara lain. Kelompok yang pertama didominasi oleh para imigran gelap asal Myanmar, Bangladesh, dan Srilanka, sementara kelompok yang kedua didominasi oleh mereka yang berasal Afghanistan, Pakistan, Irak, dan Iran.

Di luar itu, ada pula yang menjadi imigran gelap karena kepentingan pribadi, yakni, mencari peluang bisnis dan pekerjaan yang

lebih baik di negara tujuan. Oportunisme kepentingan ekonomi individual ini lebih banyak dijumpai dalam kasus-kasus imigran gelap asal RRC dan Eropa Tengah, walaupun tetap ada yang bermotif seperti ini dalam motivasi imigran gelap asal negara lain.

Sementara, yang ada kaitannya dengan bisnis ilegal, antara lain, penyelundupan dan perdagangan obat bius dan narkotika, dengan memanfaatkan lemahnya kontrol dan penegakan hukum di negara transit dan tujuan, dilakukan oleh para imigran gelap asal Afrika, seperti Nigeria, Kenya, dan sebagainya, setelah paspor mereka habis masa berlakunya. Jadi, pada awalnya, mereka bisa masuk dengan dokumen aspal (asli tetapi palsu), atau juga dokumen yang sah, namun setelah dokumen perjalanan mereka kadaluwarsa, mereka tetap menetap dan melanjutkan bisnis legalnya.

Buat para perantara atau calo dan mereka yang terlibat menyalurkan imigran gelap di negara asal, transit, maupun tujuan, uang adalah tujuan kegiatan mereka. Di Indonesia, mereka yang melakukan ini pada umumnya dimotivasi oleh kepentingan ekonomi yang mendesak. Tidak heran, orang-orang kecil yang terlibat, seperti sopir dan nelayan-nelayan tradisional mau melakukannya atas suruhan orang lain (perantara atau calo), walaupun mereka harus menghadapi resiko ancaman hukuman berat di negara tujuan dan terancam jiwa mereka akibat beratnya perjalanan dan ganasnya gelombang lautan.

Sekalipun ada akibat (korban) perkembangan situasi politik dalam negeri, namun, selalu saja terdapat kepentingan ekonomi para imigran gelap. Keinginan untuk memperoleh kesejahteraan hidup yang lebih baik dan menggapai masa depan yang lebih baik memberikan motivasi yang lebih besar daripada tinggal selamanya tanpa harapan, hidup dalam kesusahan atau keterbelakangan di negara asal. Jelasnya, tujuan para imigran gelap pada akhirnya adalah memiliki harapan dan masa depan baru yang lebih baik di negeri tujuan yang makmur kondisi ekonominya dan juga menyediakan peluang untuk maju secara luas, walaupun di luar itu, ada juga yang lebih dipicu oleh alasan politis. Tetapi, jika semua alasan lengkap ada di sana dan menjadi motivasi orang melakukan kegiatan imigran secara ilegal, maka dapat dikatakan sudah tercipta situasi yang *complex emergencies*. Contoh untuk kasus ini adalah para imigran gelap asal Afghanistan dan Irak.